



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAPORAN PAJAK**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	BD_KBGPL/SEK/SBG_KEU/9
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2017
Tanggal Revisi	1 September 2021
Tanggal Pengesahan	6 September 2021
Disahkan oleh	Kepala Badan Kesbangpol
Nama SOP :	Laporan Pajak

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kualifikasi pelaksana

- A. Kompetensi**
1. Memiliki Pengetahuan tentang Perbendaharaan
 2. Memiliki integritas
 3. Memiliki kemampuan teknis
 4. Memiliki Pengetahuan tentang Perpajakan
- B. Pendidikan**
1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D3/S1

Keterkaitan

1. SOP SPj
2. SOP Daftar Transaksi Harian Pajak

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, internet dan ATK pendukung
2. Bukti SSP
3. BKU





Peringatan



Jika SOP Laporan Pajak tidak disusun dan tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penatausahaan Pajak atas kegiatan SKPD

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen register pajak

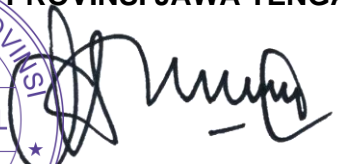
SOP LAPORAN PAJAK

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf Keuangan	Kasubag Keuangan	Sekretaris	TU PIMPINAN	Ka Badan Kesbangpol	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengumpulkan Id Billing dan bukti setor pajak dari pelaksana						Id Billing dan Bukti Bayar Pajak	2 hari	Id Billing dan Bukti Bayar Pajak	
2	Memilih <i>Id Billing</i> sesuai jenis pajak PPH 21, PPn, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2)	↓ 					Id Billing dan Bukti Setor Pajak	3 Jam	Id Billing dan Bukti Setor Pajak yang sudah dikelompokkan	
3	Menginput setoran pajak berdasarkan Id Billing dan bukti setor pajak ke dalam aplikasi <i>e SPT 21, e SPT 22, e SPT 23, e SPT PPN- PUT, PPh 4 (2)</i>	↓ 					Id Billing dan Bukti Setor Pajak yang sudah dikelompokkan	2 hari	Data <i>e SPT</i>	
4	Membuat SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPN, Daftar PPN, SPT Masa PPh 4 (2), Daftar PPh 4 (2)	↓  ↓					Id Billing dan Bukti Setor Pajak yang sudah dikelompokkan	2 hari	SPT Masa PPh 21, SPT, Masa PPh22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPN, Daftar PPN, SPT Masa PPh 4 (2), Daftar PPh 4 (2) yang sudah ditandatangani BP	










5	Mengajukan SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPh 4 (2) ke Bendahara Pengeluaran untuk di tandatangi					SPT Masa PPh 21, SPT, Masa PPh22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPh 23, SPT Masa PPh 4 (2), Daftar PPh 4 (2) yang sudah ditandatangani BP	30 menit	SPT Masa PPh 21, SPT, Masa PPh22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPh 23, SPT Masa PPh 4 (2), Daftar PPh 4 (2) yang sudah ditandatangani BP	
6.	Mengirim Laporan pajak ke kantor pajak					SPT Masa PPh 21, SPT, Masa PPh22, Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, SPT Masa PPh 23, Bukti Pemotongan PPh 23, SPT Masa PPh 23, SPT Masa PPh 4 (2), Daftar PPh 4 (2) yang sudah ditandatangani BP		Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**




HAERUDIN, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700729 199603 1 001

Keterangan :

-  Start/Akhir Proses
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Dokumentasi
-  Alur Proses Kegiatan
-  Proses Kembali
-  Lanjut/Perpindahan aktifitas halaman
-  Arsip manual
-  Soft copy